

## **IMPLEMENTASI PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

### **ABSTRAK**

Skripsi ini membahas tentang implementasi pasal 83 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji penerapan pasal 83 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam hal ini mengenai implementasi pasal 83 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur tentang pemberhentian sementara kepala daerah sesuai dengan adanya kasus yang terjadi kepada Ir. Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok selaku gubenur DKI Jakarta dalam penerapannya tidak terlaksana dengan baik oleh penegak hukum yang berwenang sehingga menimbulkan kontroversi dalam masyarakat.

**Kata kunci :** Implementasi, Pemberhentian sementara, Kepala Daerah, Register, Perkara.

*IMPLEMENTATION OF ARTICLE 83 paragraph (1) of Act No. 23 of the*

*YEAR 2014 ABOUT LOCAL GOVERNANCE*

*ABSTRACT*

*This thesis discusses the implementation of article 83 paragraph (1) of Law No. 23 of 2014 on Regional Government, the purpose of this study to know and review the application of Article 83 paragraph (1) of Law No. 23 of 2014 on Regional Government by using the method of approach legislation (statue approach). Researchers use the type of normative juridical research. In this case the implementation of Article 83 paragraph (1) of Law No. 23 of 2014 on Regional Government in which regulate the temporary dismissal of the head of the region in accordance with the existence of cases that occurred to Ir. Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok as governor of DKI Jakarta in the implementation is not implemented properly by law enforcement authorities so that cause controversy in society.*

**Keywords:** *Implementation, Dismissal, Head of Region, Register, Case.*